

IMPLEMENTASI CSR MENINGKATKAN PERAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

Ilona V. Oisina Situmeang*¹, dan Retno Sri Hartati Mulyandari**

*) Program Pascasarjana Fakultas Komunikasi UPI-YAI Jakarta

**) Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian
Kampus A Gedung Fakultas Ilmu Komunikasi Lt. 2
Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat
Telp. 081511617896 E-mail: ilonaoisina@yahoo.com

Abstract

At the dawn of the third millennium, the Indonesian nation is faced with multidimensional problems that spans across the whole order of life, including education problems. The low education level of Indonesia causes problems of low human resource quality and low per capita income. Looking at the condition, the nation's government and private sector are looking for a solution to this problem. The government has implemented a 9-year obligatory education program, while the private sector is focusing on humanity programs, such as corporate social responsibility (CSR) programs in the education sector. These educational CSR programs are expected to support the national development in various aspects of the human life. The role of education created two paradigms: The Functional Paradigm and the Socialist Paradigm. The functionalist paradigm sees underdevelopment and poverty as problems that are caused by the lack of population with adequate levels of knowledge, skills and modern perspective. The socialist paradigm sees the roles of education in development are: a) to develop individual competence; b) to develop higher competence needed to increase productivity; and c) to improve the skills of the society in general and improve the welfare of the society. Based on the socialist paradigm, education must be expanded and comprehensive to ensure progress for the nation. One of the implementation of CSR in the education world is the Cooperative Academic Education program, or Co-op. Co-op is an integrated employment education program that involves three parties, namely Students, Universities and The Business World. This program is one of the human resources education and development strategies that integrates students from various different majors in universities with a productive work experience ("work-based learning" or "work-integrated learning") to ensure that students would be able to observe and experience the business world firsthand.

Key Words: CSR, implementation, knowledge, development

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi permasalahan multidimensi yang menyentuh berbagai tatanan kehidupan mendasar manusia, di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun perilaku sebagai bentuk kemiskinan sosial yang antara lain miskin pengabdian, kurang disiplin, dan kurang empati terhadap masalah sosial. Hal ini bermuara secara mendasar pada kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang rata-rata berpendidikan rendah (SMP).

Meskipun pendidikan memiliki posisi cukup strategis untuk perubahan suatu bangsa namun

bangsa kita belum cukup optimis mengandalkan posisi tersebut karena pada kenyataannya kondisi dan hasil pendidikan di Indonesia belum memadai. Kondisi tersebut ditunjukkan dari kecilnya kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk berkompetisi dengan bangsa lain. Data yang dipublikasikan *United Development Index* sangat memprihatinkan karena *Human Development Index* (HDI) Indonesia tahun 2007/2008 menempati peringkat 107, dua peringkat di bawah Vietnam. Indikator HDI meliputi pendapatan perkapita, akses terhadap pendidikan, dan akses terhadap kesehatan. Peringkat Indonesia pada HDI tersebut merupakan indikator dari kualitas pendidikan di Indonesia bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah (Okvina, 2008).

1 Kontak Person : **Ilona V. Situmeang**
Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi
UPI-YAI Jakarta
Telp. 081511617896

Dari latar belakang pendidikan, gambaran sumber daya manusia memang belum menggembirakan. Berbagai ketimpangan pendidikan di tengah masyarakat telah terjadi, di antaranya: a) Ketimpangan antara kualitas *output* pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan; b) Ketimpangan kualitas pendidikan antar desa dan kota, antar Jawa dan luar Jawa, antar penduduk kaya dan miskin (Zamroni, 2003). Selain faktor paradigma pendidikan nasional yang memisahkan peranan agama dari kehidupan, mahalannya biaya pendidikan dan terbatasnya sarana prasarana pendidikan merupakan penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Angin segar yang tengah berhembus bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, ditandai dengan keseriusan pemerintah menetapkan 20% dari APBN untuk dana pendidikan pada tahun 2009. Meskipun demikian, untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, upaya untuk mengimplementasikan program terobosan, khususnya untuk meningkatkan peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat adalah perlunya melibatkan secara langsung pihak swasta sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial. Pada kenyataannya, saat ini biaya pendidikan masih pada kategori mahal selain kesehatan, sehingga diperlukan peran masyarakat di luar pemerintah.

Salah satu program nyata gerakan kepedulian pihak swasta (perusahaan) terhadap masyarakat adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kepedulian sejumlah perusahaan untuk memajukan dunia pendidikan melalui kegiatan CSR sangat berarti bagi dunia pendidikan. CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam UU PT No.40 Tahun 2007 yang belum lama ini disahkan DPR. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Elkington (1998) menyatakan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Oleh sebab itu, sinergisitas antara CSR dan dunia pendidikan semestinya menjadi gerakan sosial bersama secara nasional. Saatnya bagi dunia pendidikan untuk tidak perlu patah semangat, ketika pemerintah saat ini memiliki *political will* rendah dalam membantu menyelesaikan persoalan pendidikan. Setidaknya, membangun sinergisitas

CSR dan dunia pendidikan menjadi solusi alternatif di tengah stagnasi perkembangan pendidikan (Bramastia dan Kusumo W, 2007).

Bertolak dari pentingnya implementasi CSR untuk meningkatkan peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat, maka permasalahan yang perlu dikaji adalah: (1) Bagaimana konsep CSR dan implementasinya dalam dunia usaha? (2) Apa peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat? dan (3) Sejauh mana implementasi CSR dapat meningkatkan peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan mendalami dan menggambarkan implementasi CSR pendidikan dalam pembangunan masyarakat.

Konsep CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah upaya perusahaan berbagai sektor dalam mengembalikan sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Konsep CSR pada dasarnya mendorong korporasi untuk ikut memikirkan kepentingan masyarakat dengan cara mengambil tanggung jawab terhadap dampak dari aktivitas perusahaan di seluruh aspek operasinya yang dapat dirasakan oleh para pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat, serta lingkungan. Perusahaan diharapkan secara sukarela mengambil langkah-langkah lebih jauh untuk meningkatkan kualitas hidup para karyawan serta keluarganya, dan juga bagi masyarakat sekitarnya serta masyarakat secara keseluruhan (Gondomono, 2007).

Petkoski dan Twose (2003) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis berperan untuk mendukung pembangunan ekonomi, bekerjasama dengan karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat luas, untuk meningkatkan mutu hidup mereka dengan berbagai cara yang menguntungkan bagi bisnis dan pembangunan.

Di dalam *Green Paper* Komisi Masyarakat Eropa 2001 dinyatakan bahwa kebanyakan definisi CSR menunjukkan sebuah konsep tentang pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup ke dalam operasi bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara perusahaan dan para stakeholder-nya. Ini setidaknya ada dua hal yang terkait dengan TSP itu yakni pertimbangan sosial dan lingkungan hidup serta interaksi sukarela (Iriantara, 2004).

Dalam prinsip CSR, penekanan yang

signifikan diberikan pada kepentingan *stakeholders* perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan dari *stakeholders* perusahaan, menciptakan nilai tambah dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. *stakeholders* perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah sebagai regulator.

Dengan demikian, konsep CSR secara umum adalah: Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Dalam aplikasinya, konsep 4P dapat dipadukan dengan komponen dalam ISO 26000. Konsep *planet* berkaitan dengan *aspek the environment*. Konsep *people* dapat merujuk pada konsep *social development* dan *human rights* yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja) namun juga kesejahteraan sosial (pemberian jaminan sosial, penguatan *aksesibilitas* masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal). Sedangkan konsep *procedur* bisa mencakup konsep *organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues* (Marlia, 2008).

Dalam prinsip *responsibility*, penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan *stakeholders* perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Sedangkan *stakeholders* perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan termasuk di dalamnya adalah karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, lingkungan sekitar, dan pemerintah sebagai regulator. CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini, *bottom lines* lainnya selain finansial

juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya dapat terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup (Idris, 2005).

Fajar dalam Badri (2009) mengatakan bahwa perilaku para pengusaha dalam mengimplemen - tasikan CSR cukup beragam, dari kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan sampai kelompok yang menjadikan CSR sebagai nilai inti (*core value*) dalam menjalankan usaha. Terkait dengan praktik CSR, pengusaha dikelompokkan menjadi empat, yaitu: kelompok hitam, merah, biru, dan hijau.

Kelompok hitam adalah pengusaha yang tidak melakukan praktek CSR sama sekali karena hanya menjalankan bisnis untuk kepentingan sendiri. Kelompok merah adalah yang mulai melaksanakan CSR, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang dapat mengurangi keuntungannya. Kelompok ketiga adalah mereka yang menganggap praktik CSR memberi dampak positif (*return*) terhadap usahanya dan menilai CSR sebagai investasi, bukan biaya. Kelompok keempat, kelompok hijau, merupakan kelompok yang sepenuh hati melaksanakan praktek CSR. Mereka telah menempatkannya sebagai nilai inti dan menganggap sebagai suatu keharusan, bahkan kebutuhan, dan menjadikannya sebagai modal sosial (*ekuitas*). Kelompok hijau diyakini akan mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan.

Corporate Social Responsibility merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar *profitability*. Perusahaan yang menjadikan program tanggung jawab sosial sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan mempunyai *corporate image* yang lebih tinggi sehingga dapat berdampak pada *loyalitas* yang tinggi pada baik bagi masyarakat yang telah diuntungkan oleh perusahaan tersebut juga bagi konsumen yang sering mengandalkan *corporate image* dalam mengonsumsi apa yang mereka beli.

Dalam menjalankan aktivitas tanggungjawab sosial tidak ada standar atau praktik tertentu yang dianggap terbaik, Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap tanggung jawab sosialnya.

Model tanggungjawab sosial yang umum diterapkan di Indonesia menurut Susiloadi (2008) adalah: (1) tanggungjawab sosial bisa dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan. Perusahaan menjalankan program tanggungjawab sosial secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini perusahaan bisa menugaskan salah satu pejabat seniornya seperti *corporate secretary* atau *public affairs manager* atau menjadi bagian dari tugas divisi *human resource development* atau PR, (2) tanggungjawab sosial bisa pula dilaksanakan oleh yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan atau organisasi sosial sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi sosial sendiri di bawah perusahaan atau grupnya yang dibentuk terpisah dari organisasi induk perusahaan namun tetap harus bertanggungjawab ke dewan direksi. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Di sini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan, (3) sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan tanggungjawab sosial melalui kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan tanggungjawab sosial melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, atau lembaga konsultan baik dalam mengelolah dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya, dan (4) beberapa perusahaan bergabung dalam sebuah konsorium untuk secara bersama-sama menjalankan tanggungjawab sosial. Perusahaan turut mendirikan menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati.

Berdasarkan sifatnya, pelaksanaan program CSR dapat dibagi dua, yaitu: 1) Program Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CD*); dan 2) Program Pengembangan Hubungan/Relasi dengan publik (*Relations Development/RD*). Adapun sasaran dari Program CSR adalah: (1) Pemberdayaan SDM lokal (pelajar, pemuda, dan mahasiswa termasuk di dalamnya); (2) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sekitar daerah operasi; (3) Pembangunan fasilitas sosial/umum; (4) Pengembangan kesehatan

masyarakat; dan (5) Sosbud.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pola induktif. Proses dan makna CSR lebih ditonjolkan (perspektif subyektif) dalam studi ini, serta perspektif partisipan dan interpretasinya terhadap situasi menjadi standar keabsahan dalam menganalisis data hasil observasi. Analisis dilakukan berdasarkan logika induktif dengan menggunakan teori CSR yang berbasis *Community Development (CD)*.

PEMBAHASAN

Peranan Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis. John C. Bock dalam Philip dkk, (1982) mengidentifikasi peran pendidikan adalah untuk: a) Memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa; b) Mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial; dan c) Meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lainnya merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialis. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis *human investmen*, yang menyatakan bahwa investasi dalam

diri manusia lebih menguntungkan, memiliki *economic rate of return* yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik (Zamroni, 2009).

Paradigma sosialis melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) Mengembangkan kompetensi individu; b) Kompetensi yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas; dan c) Secara umum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat sehingga meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialis ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

Paradigma fungsional dan paradigma sosialis telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. **Pertama**, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analisis-mekanistik dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Mekanistik melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut: nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, kepatuhan, dan ijazah. **Kedua**, para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai *engine of growth*, penggerak, dan loke pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan, pendidikan harus mampu menghasilkan *invention* dan *innovation*, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Pendidikan harus diorganisir secara terpusat dalam suatu lembaga pendidikan formal, bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Lewat jalur tunggal ini lembaga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Agar efisien dan efektif, proses pendidikan harus disusun dalam struktur yang rigid, manajemen bersifat sentralistik,

kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori (*text bookish*).

Namun demikian, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pendidikan nasional sistem persekolahan tidak dapat berperan sebagai penggerak dan loke pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat tulisannya berjudul *Education versus Qualifications* menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik.

Berbagai problem pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan pendidikan nasional sistem persekolahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang bersifat tambal sulam (*Erratic*). Pembaharuan pendidikan nasional sistem persekolahan yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan.

Pembaharuan pendidikan nasional persekolahan harus didasarkan atas paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan nasional yang tepat, sesuai dengan realitas masyarakat dan kultur bangsa sendiri. Oleh karena itu, dewasa ini telah muncul paradigma baru peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat.

Pendidikan Sistemik-Organik.

Paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan tidak bersifat linier dan unidimensional, namun peranan pendidikan dalam pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional dengan kekuatan-kekuatan pembangunan yang lain. Dalam konstelasi semacam ini, pendidikan tidak dapat lagi disebut sebagai *engine of growth*, sebab kemampuan dan keberhasilan lembaga pendidikan formal sangat terkait dan banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang lain, terutama kekuatan ekonomi umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lembaga pendidikan sendiri tidak dapat meramalkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan oleh dunia kerja, sebab kebutuhan tenaga kerja baik jumlah dan kualifikasi yang diperlukan berubah dengan cepat sejalan kecepatan perubahan ekonomi dan masyarakat.

Paradigma peran pendidikan dalam

pembangunan yang bersifat kompleks dan interaktif, melahirkan paradigma pendidikan Sistemik-Organik dengan mendasarkan pada doktrin ekspansionisme dan teleologi. Ekspansionisme merupakan doktrin yang menekankan bahwa segala obyek, peristiwa dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan yang utuh. Suatu bagian hanya akan memiliki makna kalau dilihat dan dikaitkan dengan keutuhan totalitas, sebab keutuhan bukan sekedar kumpulan dari bagian-bagian. Keutuhan satu dengan yang lain berinteraksi dalam sistem terbuka, karena jawaban suatu problem muncul dalam suatu kesempatan berikutnya.

Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menekankan bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (*learning*) dari pada mengajar (*teaching*), 2) Pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang *fleksibel*; 3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri, dan, 4) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.

Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menuntut pendidikan bersifat *double tracks*. Artinya, pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi peserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat *double tracks* menekankan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan. Dengan *double tracks* ini sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang senantiasa berubah dengan cepat.

Implementasi CSR untuk Meningkatkan Peranan Pendidikan dalam Pembangunan

Masyarakat Indonesia

Secara umum, pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial, dan aspek kebangsaan. Sinergisme peran antara dunia pendidikan dan dunia kerja, di antaranya adalah dunia usaha (perusahaan) yang secara terpadu memberikan kesempatan interaksi di antara keduanya untuk membangun sistem pendidikan dengan paradigma sistemik-organik. Berkaitan dengan hal ini, tampak adanya peluang perlunya membangun sinergisitas dunia pendidikan dengan perusahaan, pasca disahkannya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 Juli 2007 khususnya Pasal 74 UUPT yang menyatakan adanya kewajiban melaksanakan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*).

Menurut *The World Bank Institute*, salah satu komponen utama CSR adalah pengembangan kepemimpinan dan pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu kunci pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan yang berpihak kepada kelompok miskin, maka dunia bisnis dapat memberikan kontribusi penting dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas. Bahkan, perusahaan pun dapat memberikan dampak yang kritis terhadap proses pemberdayaan melalui peningkatan standar pengembangan kepemimpinan dan pendidikan dalam perusahaan. Oleh karena itu, kemajuan dunia pendidikan memang tidak dapat berjalan sendiri, sehingga perlu ada sinergitas kerja sama antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah, yang dikemas melalui program CSR.

Salah satu implementasi CSR dalam dunia pendidikan adalah Program *Cooperative Academic Education* disingkat Co-op. Co-op adalah belajar bekerja terpadu yang melibatkan tiga pihak yaitu Mahasiswa, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha. Program ini merupakan salah satu strategi pendidikan dan pengembangan SDM yang mengintegrasikan mahasiswa dengan berbagai latar belakang ilmu dari bangku kuliah dengan pengalaman kerja yang produktif ("*work-based learning*" atau "*work-integrated learning*") agar mahasiswa dapat menemukan dan mengalami sendiri apa yang disebut "dunia kerja".

Kebijakan perusahaan dalam mengembangkan lingkungan strategis yaitu melalui

CSR menjadi landasan dari program-program kolaborasi yang terkait dengan pemberdayaan para mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan kewirausahaan melalui program Co-op. Selain dari sasaran yang bernuansa kemampuan penguasaan teknologi dan bisnis tersebut, program CSR juga ditujukan untuk memberikan akses dalam pemberdayaan masyarakat baik yang terkait langsung dengan proses Bisnis Perusahaan maupun lingkungan strategis yang lain, misalnya lingkungan dunia pendidikan.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk bekerjasama dengan DPPK (Dewan Pengembangan Program Kemitraan) telah menyelenggarakan Program Co-op sejak tahun 1998. Hingga tahun 2008, perguruan tinggi yang telah berpartisipasi dalam Program Co-op PT Telekomunikasi Indonesia Tbk berjumlah 32 perguruan tinggi yang tersebar diseluruh Indonesia dan telah merekrut dan memberikan kesempatan Magang untuk sebanyak 1.170 mahasiswa, dan dari 1170 mahasiswa yang telah melaksanakan Co-op di TELKOM sebagian direkomendasikan untuk dapat mengikuti Program Rekrut dan banyak di antara mereka saat ini telah meniti karir di PT. TELKOM (<http://www.telkom.co.id>)

Kegiatan lain terkait dengan CSR di bidang pendidikan adalah *Partners in Learning* oleh Micosoft Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dengan mendukung berbagai pihak yang memiliki tujuan meningkatkan mutu pengajaran melalui peningkatan kemampuan profesional pendidik. Selama empat tahun terakhir, Microsoft telah bermitra erat dengan Depdiknas, terutama melalui Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang memiliki 30 Lembaga Penjamin Mutu Pendidik (LPMP) di 30 provinsi. Program pelatihan bagi pendidik yang dilakukan secara rutin merupakan salah satu cara strategis bagi Microsoft untuk menawarkan dukungannya dalam berpartisipasi di dalam kegiatan pendidikan melalui *peer coaching*.

Peer coaching tidak hanya sekedar pelatihan pemanfaatan informasi teknologi di sekolah. Modul pelatihan ini merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru secara menyeluruh. Penekanan dalam pelatihan ini adalah pada komunikasi dan bagaimana para pesertanya berbagi materi ajar yang berbasis TIK. Oleh karenanya, para peserta modul pelatihan *peer coaching* sudah diasumsikan mampu dan terbiasa dalam menggunakan komputer di kelas. Yang penting

adalah para peserta dibawa ke pemikiran bahwa mereka tidak sendiri dalam menjalankan tugas-tugasnya karena rekan-rekan sesama pendidik ikut mendukung, dan mereka pun diharapkan juga memberi dukungan yang sama dalam pengajaran (Gondomono, 2007).

Dalam laporan Yulnardi (Kompas, Maret 2009), dinyatakan bahwa kepedulian sejumlah perusahaan untuk memajukan dunia pendidikan melalui kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) sangat berarti bagi dunia pendidikan. Jika sekarang cenderung CSR diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa maka ke depan CSR diharapkan dapat mendongkrak pencapaian angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi, yang sampai sekarang masih rendah. APK perguruan tinggi sampai sekarang masih menjadi masalah. Tahun 2008 lalu APK perguruan tinggi (PT) adalah 17,75 persen. Tahun 2009 diharapkan dapat meningkat menjadi 19 persen. Lima tahun ke depan, APK PT ditargetkan mencapai 25 persen. Untuk mencapai peningkatan APK ini, perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lulusan SMA untuk masuk perguruan tinggi.

Selain untuk calon mahasiswa, CSR korporasi perlu juga diarahkan untuk membantu penelitian dosen dan membantu perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas. Biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas tidaklah murah, terutama apabila diarahkan untuk mencapai taraf daya saing dunia (*global competitiveness*). Sementara itu, alokasi dana dari pemerintah sendiri maupun yang dihimpun dari penerimaan pendidikan juga terbatas. Kepedulian perusahaan swasta dalam memberikan dukungan bagi pendidikan tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh Bank CIMB Niaga yang merealisasikan bantuan senilai Rp 17 miliar untuk implementasi kegiatan CSR dalam bentuk pembangunan Gedung Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) yang berlokasi di Depok. Selain itu, Bank CIMB Niaga akan membantu FEUI dalam berbagai materi pengajaran yang menyangkut aspek teknis penerapan *corporate banking* dan *corporate finance* dengan mengirimkan pengajar yang merupakan praktisi perbankan Bank CIMB Niaga sendiri. Bank CIMB Niaga juga menyediakan program magang bagi mahasiswa yang baru lulus. Di lain pihak, FEUI juga akan mengirimkan pengajar untuk meningkatkan *knowledge management* karyawan Bank CIMB

Niaga sendiri sehingga dapat diterapkan pola *training for trainers*. Dalam skema kerja sama ini, FEUI juga akan memberikan kesempatan beasiswa bagi karyawan Bank CIMB Niaga untuk menempuh program pendidikan S-1 hingga S-3 di FEUI.

Dalam mengimplementasikan CSR di bidang pendidikan, ribuan insinyur akan direkrut dalam empat tahun mendatang untuk mendukung kegiatan hulu Pertamina, khususnya dalam rangka memperoleh sumber energi yang baru. Dalam hal ini IPB telah menerima bantuan pembangunan Auditorium Fakultas Kehutanan IPB, rumah kaca, dan penambahan fasilitas kemahasiswaan berupa komputer serta printer senilai Rp 2,272 milyar dari Pertamina melalui program CSR. Selain IPB, bantuan di sektor pendidikan juga diberikan kepada beberapa universitas lain oleh Pertamina seperti UI, ITB, UGM, Unhas, Unpad dengan jumlah bantuan bervariasi. Bantuan tersebut juga merupakan bagian dari program Pertamina *Goes to Campus* yang sudah mulai berjalan sejak 2007 dan akan terus dikembangkan pada 2009. Selain itu, Pertamina juga telah memberikan beasiswa kepada ribuan pelajar untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan di Indonesia (Suara Karya, 2009)

Arah implementasi CSR yang mulai menitikberatkan pada aspek pendidikan semakin terasa diwujudkan oleh berbagai perusahaan. Sebagaimana dilakukan oleh PP London Sumatra (Lonsum) Indonesia, Tbk, yang dewasa ini memfokuskan pengucuran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)-nya kepada dunia pendidikan. Alasan manajemen perusahaan itu memfokuskan ke dunia pendidikan, karena selain melihat fakta bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih memprihatinkan, juga dengan pemikiran diperlukannya SDM handal yang "lahir" dari pendidikan yang memadai. Pada tahun 2008 ini, Lonsum membantu perbaikan 44 sekolah negeri di berbagai desa yang beroperasi di sekitar wilayah kerja perusahaan dan juga memberikan bantuan berupa komputer, beasiswa kepada siswa dan termasuk pelatihan kepada para guru. Lonsum secara langsung dan tidak langsung menciptakan sekitar 12 ribuan lapangan pekerjaan di pedesaan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Jawa yang merupakan wilayah operasional perusahaan tersebut (Lonsum, 2009).

PT HM Sampoerna, salah satu perusahaan rokok besar di negeri ini juga menyediakan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja PT

HM Sampoerna, beasiswa tersebut juga diberikan kepada masyarakat umum. Selain itu, melalui program bimbingan anak Sampoerna, perusahaan ini terlibat sebagai sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan. Implementasi CSR untuk meningkatkan peranan pendidikan dalam pembangunan masyarakat tidak hanya dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan multinasional, atau perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan yang memiliki omzet tidak terlalu besar juga dapat melakukannya. Inti dari CSR bukanlah kepada besar kecilnya dana yang dikeluarkan, melainkan komitmen yang diberikan perusahaan kepada masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sekitarnya, khususnya bidang pendidikan. Berkaitan dengan keuntungan, CSR tentu menguntungkan, tetapi keuntungan yang diterima mungkin dalam jangka waktu panjang. Karena CSR bukanlah program sekali dan selesai, namun harus tetap berkelanjutan. Meskipun implementasi CSR khususnya di bidang pendidikan membutuhkan waktu yang lama, namun CSR akan memberikan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan bagi perusahaan.

Implementasi CSR dapat lebih mengarah kepada suatu biaya materi pendidikan yang dikelola dan diterapkan langsung kepada masyarakat, sekaligus mendatangkan keuntungan sosial dalam bidang pendidikan. Upaya mensinergikan CSR dan dunia pendidikan, merupakan langkah strategis perusahaan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar di lokasi perusahaan itu berdiri. Kepekaan perusahaan terhadap dunia pendidikan merupakan investasi yang tak akan mubazir serta memberi manfaat secara berkesinambungan.

SIMPULAN

Meskipun kedudukan pendidikan cukup strategis dalam pembangunan masyarakat, namun bangsa kita belum cukup optimis mengandalkan posisi tersebut karena pada kenyataannya kondisi dan hasil pendidikan di Indonesia belum memadai untuk berkompetisi dengan bangsa lain. Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan, perlunya melibatkan secara langsung pihak swasta sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial. Salah satu program nyata gerakan kepedulian pihak swasta (perusahaan) terhadap masyarakat adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi dunia pendidikan. Konsep CSR secara umum adalah bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan

sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Berdasarkan sifatnya, salah satu pelaksanaan program CSR merupakan program pengembangan sasaran utamanya di antaranya adalah pemberdayaan SDM lokal (pelajar, pemuda, dan mahasiswa).

Pendidikan nasional sistem persekolahan saat ini ternyata tidak dapat berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan bahkan justru telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik. Paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan tidak bersifat linier dan unidimensional, namun peranan pendidikan dalam pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional dengan kekuatan-kekuatan pembangunan yang lain.

Sinergisitas antara CSR dan dunia pendidikan merupakan gerakan sosial bersama secara nasional yang perlu disosialisasikan. Sinergisitas CSR dan dunia pendidikan menjadi solusi alternatif di tengah stagnasi perkembangan pendidikan. Berbagai implementasi CSR melalui kegiatan pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur lembaga pendidikan, maupun pemberian kesempatan magang oleh berbagai perusahaan menjadikan peran pendidikan akan semakin besar dalam pembangunan masyarakat pada umumnya. Kepekaan perusahaan terhadap dunia pendidikan merupakan investasi yang tak akan mubazir serta memberi manfaat secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Badri. 2009. Peran PR dalam Membangun Citra Perusahaan melalui Program CSR. [terhubung berkala] 4 Mei 2009. <http://ruangdosen.wordpress.com/2009/01/15/peran-pr-dalam-membangun-citra-perusahaan-melalui-program-csr/>

Bramastia dan Djati Kusumo W. 2007. Segitiga Peran Strategis Pendidikan. [terhubung berkala] 25 April 2009. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0708/27/opi03.htm>

Budimanta, Arif; Adi Prasetyo, dan Bambang

Rudito. 2004. Corporate Social Responsibility Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development.

Elkington, John. 1998. *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*, Gabriola Island, BC: New Society Publishers.

Gondomono, Ananta. 2007. Mendukung Program Pendidikan di Indonesia. [terhubung berkala] 28 April 2009. <http://web.bisnis.com/sektor-riil/telematika/1id24527.html>

Idris, Abdul Rasyid. 2005. Corporate Social Responsibility (CSR) Sebuah Gagasan dan Implementasi. [terhubung berkala] 23 April 2009. <http://www.fajar.co.id/>.

Irianta, Yosol. 2004. *Community Relations. Konsep dan Aplikasinya*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

John C. Bock. 1982. *Education and Development: A Conflict Meaning in Philip G. Altbach, Robert F. Arnove, Gail P. Kelly, eds. Comparative Education*. New York, Mac Millan.

Lonsum. 2009. CSR Lonsum fokuskan pada Pendidikan. [terhubung berkala] 4 Mei 2009. <http://newslinkweb.com/2008/12/08/csr-lonsum-fokus-ke-pendidikan/>

Majalah Bisnis dan CSR. 2007. *Regulasi Setengah Hati*, Edisi Oktober 2007.

Marlia, Makna Ani. 2008. Pentingnya Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia. [terhubung berkala] 28 Maret 2009. <http://mamrh.wordpress.com/2008/07/21/53/>

Okvina Nur Alvita, Gina Ginanjarsari, dan Ahmad Alam. 2008. Pendidikan Holistik Berbasis Kearifan Lokal pada KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan): Jawaban Meningkatkan Social Capital Indonesia dan Daya Saing Bangsa. [terhubung berkala] 26 Maret 2009. <http://okvina.wordpress.com/2008/04/28/kktm-kompetisi-karya-tulis-mahasiswa-bidang-pendidikan-2008/>

Petkoski, Djordjija and Twose, Nigel (Ed). 2003. Public Policy for Corporate Social Responsibility. Jointly sponsored by The World Bank Institute, the Private Sector Development Vice Presidency of the World Bank, and the International Finance Corporation. [terhubung berkala] 20 April 2009. <http://info.worldbank.org/> July 7–25, 2003.

Suara Karya Online. 2009. Dinamika Pertamina Program Goes to Campus. IPB IPB Peroleh Dana CSR Rp 2,2 Miliar. [terhubung berkala] 2 Mei 2009. <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=221897>

Telkom. 2009. *UNP Jalin kerjasama Cooperative Academic Education* dengan PT. Telkom. [terhubung berkala] 4 Mei 2009. <http://www.telkom.co.id>

Zamroni. 2009. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Terhubung Berkala [28 Maret 2009] http://pakguruonline.pendidikan.net/wacana_pdd_1.html

